



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 228 /PMK.05/2010 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK
DITANGGUNG PEMERINTAH

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : (01) Nomor : (02)

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (03).....

Agar Melakukan Pembayaran Sejumlah (04)

***(05) ***

Cara Bayar	: <input type="checkbox"/> 6 Pengesahan	Tahun Anggaran	: (06) ...
Dasar Pembayaran :		Klasifikasi Belanja	5513 KP/KD/DK/TP/DS <input type="checkbox"/> KP
(07)		Fungsi, Subfungsi, Program	(08)
		Satker	Unit Organisasi
		(09) ...	999.07 01.99
		(10)	
		Jenis Pembayaran	: <input type="checkbox"/> 1 Pengeluaran Anggaran
		Sifat Pembayaran	: <input type="checkbox"/> 6 Pengesahan
		Sumber Dana/Cara Penarikan	: 01.0 RM/RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Kegiatan/Subkegiatan, MAK	Jumlah uang	Lembaga/Unit/Lokasi/MAP	Jumlah uang
XXXX.XXXX.55132x	(11) ...	015.04.01.99.411XXX	(12) ...
Jumlah Pengeluaran	(13) ...	Jumlah Potongan	(14) ... (15) ...

Kepada	: Para penerima subsidi pajak ditanggung pemerintah
NPWP	: -
Nomor Rekening Nama	: -
Rekening	: -
Bank / Pos	: -
Uraian	: Pengesahan Atas Pembayaran Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah untuk 16) ...
	(17) ... , tanggal seperti diatas a.n. Menteri Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (18)
	(19).....
	(20).....
	NIP.....(21)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPM P-DTP)

NOMOR	URAIAN/PISAH
(01)	Diisi tanggal penerbitan SPM
(02)	Diisi nomor penerbitan SPM
(03)	Diisi nama KPPN mitra kerja kantor/Satuan Kerja
(04)	Diisi jumlah dana yang dimintakan dengan angka
(05)	Diisi jumlah dana yang dimintakan dengan huruf
(06)	Diisi tahun anggaran yang berjalan
(07)	Diisi dasar-dasar pembayaran, antara lain: peraturan (UU) tentang APBN yang berlaku dan dokumen anggaran yang dipergunakan
(08)	Diisi kode fungsi, subfungsi dan program
(09)	Diisi kode kantor/Satuan Kerja
(10)	Diisi nama kantor/Satuan Kerja
(11)	Diisi jumlah pengeluaran per kegiatan, subkegiatan dan kode akun dengan angka
(12)	Diisi jumlah penerimaan per kementerian negara/lembaga, unit organisasi eselon I, lokasi dan kode akun penerimaan dengan angka
(13)	Diisi hasil penjumlahan pengeluaran dengan angka
(14)	Diisi hasil penjumlahan penerimaan dengan angka
(15)	Diisi hasil pengurangan nomor (13) dengan nomor (14) sebagai jumlah dana yang dibayarkan atau dicairkan dengan angka
(16)	Diisi uraian "Pengesahan Atas Pembayaran Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah untuk (per jenis pajak DTP, mis: komoditas panas bumi)"
(17)	Diisi tempat SPM dibuat dan ditandatangani
(18)	Diisi nama jabatan penerbit SPM
(19)	Diisi tanda tangan penerbit SPM dan dibubuhinya cap dinas kantor/satuan kerja
(20)	Diisi nama pejabat yang menandatangani SPM
(21)	Diisi NIP/NRP pejabat yang menandatangani SPM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 228 /PMK.05/2010 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAÑ ATAS PAJAK
DITANGGUNG PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPTB P-DTP)

Nomor:

1. Nama Satuan Kerja : (Diisi nama satker)
2. Kode Satuan Kerja : XXXXXX
3. Tanggal / No. DIPA :
4. Sub Kegiatan : XXXXX
5. Klasifikasi Belanja : 5513

Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(Diisi nama satker) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut:

No	AKUN	Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah
				Tanggal	Nomor	
1.	55132X	Per WP	Jenis Pajak DTP (Diisi tanggal Dokumen) (Diisi Nomor Dokumen)	Rp
2.	55132X	Per KPP	Jenis Pajak DTP (Diisi tanggal Dokumen) (Diisi Nomor Dokumen)	Rp
3.	55132X	Pemegang SBN,	Jenis Pajak DTP (Diisi tanggal Dokumen) (Diisi Nomor Dokumen)	Rp
Jumlah						Rp

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Satuan Kerja(Diisi nama satker) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NAMA
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM REPUBLIK INDONESIA
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN
BIRO UMUM
GIARTO
NIP19590420198102501


MENTERI KEUANGAN
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 2/8 /PMK/05/2010 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK
DITANGGUNG PEMERINTAH

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN/ATAU BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX-XXXXXX-XXXX
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN /LEMBAGA ESelon I	: (015) KEUANGAN : (04) DITJEN PAJAK
WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA	: (0100) DKI JAKARTA : XXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXX
JENIS SATUAN KERJA	: (KP) KANTOR PUSAT

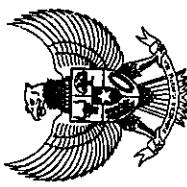
KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REAL PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	
1	2	3	4	5	6
I	Penerimaan Dalam Negeri				7
XX	TRANSAKSI KAS				
XXX	Penerimaan Perpajakan				
XXXX	Pendapatan Pajak Dalam Negeri				
XXXXX	Pendapatan Pajak Penghasilan				
XXXXXX	Pendapatan PPh Non Migas				
XXXXXXX	Uraian Mata Anggaran				
XXXXXXX	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
XXXXXXX	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
XXXXXXX	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
XXXXXXX	Jumlah Pendapatan XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II	Pendapatan Hibah			
XX	Pendapatan Hibah			
XXX	Pendapatan Hibah			
XXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri			
XXXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri			
XXXXXX	Uraian Mata Anggaran	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
	Jumlah Pendapatan XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
	Jumlah Pendapatan Hibah	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
	TRANSAKSI NON KAS			
	Pendapatan Pajak			
	XXXX	Pendapatan Pajak		
	XXXXX	Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah		
	XXXXXX	Jumlah Transaksi Non Kas		
		JUMLAH PENDAPATAN, HIBAH, (TRANSAKSI KAS DAN NON KAS)	999,999,999,999	999,999,999,999



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXXX XXXX
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN LEMBAGA : (99)
ESelon I : (07)
WILAYAH/PROPINSI : (0100)
SATUAN KERJA : XXXXXX
JENIS SATUAN KERJA : (KP)

BENDAHARA UMUM NEGARA
BELANJA SUBSIDI
DKI JAKARTA
KANTOR XXXXXXXXX
KANTOR PUSAT

KODE LAP. :XXXXXX
TANGGAL :XXXX/XXXX
HALAMAN : XX
PROG. ID : XXXXXXXX

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA		% REAL. ANGG.	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	TRANSAKSI KAS			3	4	5	6
XX	Uraian Sumber Dana						
X	Uraian Cara penarikan						
XX	Uraian Fungsi						
XX	Uraian Sub Fungsi						
XXX	Uraian Program						
XXX	Uraian Kegiatan						
XXXX	Uraian Sub Kegiatan						
XX	Uraian Jenis Belanja						
XXX	Uraian Jenis Belanja						
XXXXXX	Uraian MA						
XXXXXX	Uraian MA						
	JUMLAH BELANJA XXXX						
	JUMLAH BELANJA XX						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

	JUMLAH BELANJA SUB KEGIATAN XXXX.XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,999	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,999	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA PROGRAM XX.XX.XXX.XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,999	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI XX.XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,999	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA FUNGSI XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,999	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN X	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,999	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,999	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,999	999,999,999,999
	Transaksi Non Kas							
XX	Belanja Subsidi							
X	Uraian Sumber Dana							
XX	Uraian Cara penarikan							
XX	Uraian Fungsi							
XX	Uraian Sub Fungsi							
XXXX	Uraian Program							
XXXX	Uraian Kegiatan							
XXXX	Uraian Sub Kegiatan							
XXXX	Uraian Jenis Belanja							
XXXXXX	Uraian MAK							
XXXXXX	Uraian MAK							
	JUMLAH BELANJA XXXX							
	Jumlah Transaksi Non Kas							
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS)							
	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,999	999,999,999,999

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDJO

Salinan sesuai dengan asli saya
KEPALA BIRO BANTUAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
u.b.
KEPALA BIRO BANTUAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
GIARTO
NIP19590420196021801
JKT JERDENY *

